

INOVASI ELEKTRONIK PENGENDALIAN DAN EVALUASI (E-DALEV) UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH DI KOTA SERANG

Irrelian Janewa¹, Raisha Putri², Nurhaeni³

irrelianxjnw18@gmail.com¹, putriraisha790@gmail.com², haeninur338@gmail.com³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Digitalisasi tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Kamala et al., 2025). Namun, praktik penyusunan anggaran di Kota Serang masih menghadapi kendala berupa kurangnya integrasi data, lemahnya dokumentasi proses pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses publik terhadap informasi perencanaan dan legislasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran e-DALEV dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola anggaran melalui kajian literatur terkini. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi pustaka, memanfaatkan artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan terkait digital governance dan penganggaran daerah. Literatur dipilih secara purposive dengan rentang tahun 2021–2025, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis dokumen (document analysis). Hasil analisis menunjukkan bahwa penyusunan APBD masih dipengaruhi ketidakjelasan kewenangan, kompromi politik, dan rendahnya pemahaman publik terhadap mekanisme formal. Sistem digital yang telah tersedia seperti e-Planning dan e-Budgeting belum menyediakan rekam jejak keputusan yang terintegrasi antara Bappeda dan DPRD. e-DALEV hadir sebagai solusi yang berpotensi memperkuat koordinasi kelembagaan, menyediakan dokumentasi real-time, serta meningkatkan transparansi deliberatif melalui digital traceability yang mampu menekan politisasi anggaran. e-DALEV berpotensi menjadi penggerak reformasi tata kelola anggaran daerah melalui penguatan kapasitas aparatur, penataan ulang mekanisme kerja Bappeda, serta pengembangan strategi komunikasi publik yang lebih partisipatif dan sistematis.

Kata Kunci: Transparansi Anggaran, Tata Kelola Pemerintahan, Digitalisasi Pemerintah.

ABSTRACT

The digitalization of government management is an urgent need to improve transparency and accountability in the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) (Kamala et al., 2025). However, the budgeting process in Serang City still faces several challenges, including limited data integration, weak documentation of decision-making processes, and restricted public access to planning and legislative information. This study aims to analyze the role of e-DALEV in strengthening transparency, accountability, and the effectiveness of budget management through a review of current literature. The study uses a qualitative approach with a literature review method. It utilizes scientific articles, books, research reports, and policy documents related to digital governance and regional budgeting. The literature was selected purposively for the period 2021–2025, and then analyzed using a document analysis approach. The analysis shows that the preparation of the APBD is still influenced by unclear authority, political compromise, and the public's limited understanding of formal procedures. Existing digital systems, such as e-Planning and e-Budgeting, do not provide an integrated record of decisions between Bappeda and the DPRD. e-DALEV appears as a solution with the potential to strengthen institutional coordination, provide real-time documentation, and increase deliberative transparency through digital traceability, which can reduce the politicization of the budget. e-DALEV has the potential to drive the reform of regional budget management by strengthening staff capacity, reorganizing Bappeda's work mechanisms, and developing a more participative and systematic public communication strategy.

Keywords: Budget Transparency, Good Governance, Government Digitalizations.

PENDAHULUAN

Digitalisasi tata kelola pemerintahan semakin menjadi kebutuhan utama dalam meningkatkan integritas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Kamala et al., 2025). Namun, praktik penyusunan APBD di banyak daerah, termasuk Kota Serang, masih menghadapi persoalan mendasar berupa minimnya integrasi data, lemahnya dokumentasi proses pengambilan keputusan, dan terbatasnya akses publik terhadap informasi perencanaan dan legislasi anggaran. Hal ini memperlihatkan bahwa peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai aktor teknokratis belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama ketika dihadapkan pada dinamika politik dalam pembahasan anggaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Fadhilah, 2021). Ketiadaan sistem evaluatif yang mampu merekam pembahasan secara menyeluruh turut memperbesar risiko disfungsi birokrasi dan praktik penganggaran yang tidak transparan (Sariono & Sitorus, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam proses anggaran dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terutama ketika sistem tersebut mampu menyediakan rekam jejak yang dapat diaudit publik (Firnanda et al., 2025). Sementara itu, keberhasilan e-government sangat dipengaruhi kesiapan birokrasi dan kualitas infrastruktur digital (Kannapadang et al., 2025). Kajian lainnya menegaskan bahwa interaksi antara transparansi dan kesiapan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran daerah (Yuniar & Firmansyah, 2023). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut hanya berfokus pada efektivitas e-budgeting atau e-planning secara parsial, dan belum menelaah secara komprehensif sistem digital yang dapat mengintegrasikan fungsi perencanaan, legislasi, dan evaluasi dalam satu platform kolaboratif.

Kesenjangan dalam literatur mengenai kebutuhan sebuah sistem terpadu yang mampu menjembatani kepentingan teknokratis Bappeda dan fungsi pengawasan DPRD. Sistem semacam ini diperlukan bukan hanya untuk menyediakan informasi anggaran, tetapi juga untuk menyimpan rekam jejak deliberasi kebijakan (Mutmainah et al., 2025), sehingga seluruh proses penyusunan APBD dapat ditelusuri secara transparan oleh publik dan auditor (Muhammad Irfan Ma'ruf, Fania Cindy Levina, 2024). Pada konteks ini, Electronic Development and Legislation Evaluation (e-DALEV) menjadi relevan sebagai inovasi digital yang berpotensi menyatukan proses perencanaan pembangunan, pembahasan legislasi anggaran, dan pemantauan evaluatif dalam satu ekosistem data yang terintegrasi.

Penelitian ini berkontribusi pada analisis konseptual terhadap e-DALEV sebagai instrumen tata kelola yang tidak hanya mendigitalisasi dokumen anggaran, tetapi juga menghubungkan proses teknis dan politis secara simultan. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana e-DALEV dapat menjawab persoalan lemahnya transparansi, mengurangi ruang politisasi dalam pembahasan anggaran, memperkuat profesionalisme teknokratis Bappeda, serta meningkatkan efektivitas pengawasan DPRD terhadap penyusunan APBD. Secara konseptual, penelitian ini menyatakan bahwa integrasi e-DALEV akan mendorong meningkatnya transparansi substantif melalui penyediaan rekam jejak digital pembahasan anggaran yang dapat diakses dan diaudit oleh publik. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis potensi dan peran e-DALEV dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas tata kelola anggaran daerah di Kota Serang melalui kajian literatur terkini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur sebagaimana dikemukakan Creswell (2018) bahwa penelitian kualitatif bertujuan membangun pemaknaan melalui analisis interpretatif terhadap dokumen dan sumber pengetahuan ilmiah. Seluruh data diperoleh dari sumber sekunder berupa artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan digital governance, transparansi anggaran, dan relasi kelembagaan Bappeda DPRD. Literatur dalam penelitian ini dipilih secara purposive dengan rentang tahun 2021–2025, memanfaatkan artikel ilmiah, buku, jurnal penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan digital governance serta penganggaran daerah. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan analisis dokumen (document analysis) sebagaimana dijelaskan Bowen (2009), yaitu menelaah isi, konteks, dan temuan berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola dan isu substantif terkait transparansi anggaran dan integrasi sistem digital. Proses analisis meliputi peninjauan sistematis terhadap argumen utama tiap literatur, pencarian hubungan antar-temuan, serta penarikan makna teoretis tanpa menggunakan teknik reduksi data, pengkodean, atau kategorisasi seperti pada penelitian kualitatif lapangan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memetakan persoalan penyusunan APBD, termasuk ketidakjelasan kewenangan, pengaruh politik legislatif, serta keterbatasan rekam jejak digital pada sistem e-Planning dan e-Budgeting, yang kemudian dikaitkan dengan peran e-DALEV sebagai inovasi tata kelola.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Aziz et al., 2024). Dalam konteks pemerintahan daerah, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memegang peranan strategis karena menjadi instrumen utama dalam menentukan arah pembangunan serta distribusi sumber daya publik (Edtiyarsih, 2023). Namun, upaya mewujudkan transparansi anggaran daerah masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa di antaranya seperti permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah ketidakpahaman atau kurangnya kejelasan publik mengenai proses penyusunan APBD, serta bagaimana penyusunan tersebut berinteraksi dengan kebijakan APBN. Dalam praktiknya, APBD disusun oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berdasarkan pedoman umum dari APBN serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (Sitepu & Mahesa, 2022). Selanjutnya, rancangan APBD dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Hasibuan, 2022). Demikian dibutuhkan digitalisasi Government untuk menjaga integritas keterlibatan Bappeda dan DPRD.

Permasalahan dimulai dengan persepsi Masyarakat terhadap kinerja birokrasi anggaran kerap kali dibentuk oleh informasi yang parsial dan ketidaktahuan terhadap mekanisme formal yang berlaku (Emilia Gustini & Marcelina Angraini, 2025). Akibatnya, muncul asumsi bahwa setiap kebijakan anggaran yang kontroversial. Kelemahan persepsi ini menunjukkan adanya jarak antara instisusi legislatif dan konstituen dalam hal transparansi. Berdasarkan berbagai kajian literatur mengenai dinamika penganggaran daerah, ditemukan bahwa narasi publik mengenai proses politik anggaran sering kali dipengaruhi oleh asumsi tentang adanya politisasi atau dominasi kepentingan tertentu dalam internal DPRD (Rasyid, 2022). Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan anggaran pada umumnya dilakukan melalui mekanisme kolektif-

kolegial, di mana keputusan ditetapkan melalui musyawarah mufakat dan tidak sepenuhnya mencerminkan dominasi aktor tertentu (Hasani, 2025). Meskipun demikian, pola kolektif-kolegial ini justru kerap menyulitkan identifikasi aktor dominan dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga membutuhkan dukungan sistem dokumentasi digital untuk memperjelas rekam jejak keputusan.

Bappeda sebagai lembaga teknokratik, memiliki peran strategis dalam mendukung proses penganggaran (Ainurrofiq, 2025). Namun masih terdapat disharmoni antara peran serta minimnya integrasi data antara eksekutif dan legislatif (Simanjuntak & Silalahi, 2025). Oleh karena itu, reformasi peran Bappeda melalui pemanfaatan sistem digital dipandang penting untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih partisipatif, terukur, dan transparan (Ikhyanuddin et al., 2025). Studi-studi mengenai tata kelola anggaran daerah menekankan bahwa digitalisasi informasi menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta kualitas pengambilan keputusan berbasis data (Komara, 2025). Keterbatasan sistem yang mampu mendokumentasikan hasil rapat, perencanaan program, dan realisasi anggaran antara eksekutif dan legislatif sering disebut sebagai tantangan besar dalam membangun pemerintahan yang akuntabel (Rahman et al., 2024). Ketiadaan data terintegrasi inilah yang kemudian menghambat evaluasi terhadap efektivitas belanja daerah. Karena itu, integrasi sistem digital dianggap esensial untuk memastikan bahwa setiap rencana pembangunan yang disusun oleh Bappeda dapat dipantau secara sistematis oleh DPRD, sekaligus memberikan akses evaluatif terhadap capaian realisasi program pembangunan.

Analisis Masalah Berdasarkan Teori

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Serang dapat dianalisis melalui beberapa kerangka teori, yaitu teori good governance, e-government, dan meritokrasi. Berdasarkan teori good governance, tata kelola pemerintahan yang baik menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta orientasi pada kepentingan publik dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk dalam penyusunan APBD (Ikhyanuddin et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kendala berupa dominasi kepentingan individu atau kelompok tertentu (patrimonialisme) serta politisasi peraturan perundang-undangan yang menyebabkan proses penyusunan APBD lebih berorientasi pada kompromi politik dibandingkan analisis kebutuhan berbasis data (Yamin, 2022). Hal ini mengakibatkan terjadinya disfungsi birokrasi dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik serta legitimasi pemerintahan daerah.

Selanjutnya, teori e-government menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pelayanan publik (Rachmad et al., 2024). Digitalisasi sistem penganggaran, seperti melalui penerapan e-DALEV (Elektronik Pengendalian dan Evaluasi), diharapkan mampu mempercepat akses informasi, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta memperluas partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap proses perencanaan dan penganggaran daerah. Digitalisasi ini juga dapat mengurangi praktik birokrasi yang lamban dan prosedur yang berbelit-belit, sehingga pelayanan publik menjadi lebih responsif dan akuntabel. Namun, keberhasilan implementasi e-government sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta perubahan budaya birokrasi agar lebih adaptif terhadap inovasi digital (Setiawan et al., 2022).

Dari sudut pandang teori meritokrasi, pengelolaan anggaran daerah seharusnya didasarkan pada prinsip profesionalisme dan keadilan, di mana distribusi kewenangan dan sumber daya dilakukan secara adil dan transparan berdasarkan kinerja serta kebutuhan riil masyarakat, bukan karena kedekatan politik atau kompromi elit (Irianto et al., 2025).

Meritokrasi menuntut agar setiap individu atau institusi yang terlibat dalam proses penganggaran dinilai berdasarkan prestasi dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah (Hidayati, 2021). Namun, dalam kenyataannya, proses penyusunan APBD masih diwarnai oleh praktik kompromi politik dan dominasi kelompok tertentu, sehingga prinsip meritokrasi belum sepenuhnya terwujud (Rasyid, 2022). Berdasarkan analisis ketiga teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa reformasi tata kelola anggaran daerah di Kota Serang sangat membutuhkan integrasi sistem digital yang transparan dan akuntabel. Digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai katalis terjadinya transformasi kelembagaan yang lebih substansial. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat transformasi digital, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkuat pengawasan internal dan eksternal agar prinsip-prinsip good governance dan meritokrasi benar-benar dapat diwujudkan dalam pengelolaan APBD.

Model Penyelesaian

Inovasi e-government bukan sekadar alat teknis, melainkan refleksi dari arah baru dalam reformasi pengelolaan anggaran daerah (Khotimah et al., 2025). Kunci keberhasilannya terletak pada sinergi antara reformasi internal, kemitraan strategis, dan kesadaran publik. Transparansi di era digital harus dibangun tidak hanya dengan membuka informasi, tetapi juga dengan memperkuat konteks komunikasi dan kejelasan politik institusional (Taufik et al., 2025). Dalam dimensi fungsional, e-Dalev disini bukan hanya platform teknis tetapi juga katalisator transformasi kelembagaan, yang mengubah budaya birokrasi dari sekadar administratif menjadi responsif dan deliberatif. Adapun bagaimana dinamika relasi Bappeda dan DPRD dapat mempengaruhi persepsi publik, dan bagaimana sistem digital dapat mengembalikan kepercayaan terhadap proses penganggaran dapat diketahui sebagai berikut:

1. Integrasi Sistem E-DALEV dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah

Platform e-Dalev merupakan inovasi digital yang secara strategis dikembangkan untuk menjaga integritas komunikasi dan koordinasi antara Bappeda dan DPRD Kota Serang. Berbeda dengan situs pemerintah lainnya, orientasi pengembangan e-Dalev tidak sekadar sebagai wadah informasi, namun juga sebagai media kontrol komunikasi kebijakan, dengan menampilkan hasil akhir dari proses perumusan anggaran. Strategi ini didasarkan pada pertimbangan stabilitas sosial-politik penundaan publikasi hingga tahap final dimaksudkan untuk menghindari kegaduhan publik atau resistensi prematur yang mungkin timbul apabila rancangan kebijakan belum memperoleh legitimasi hukum. Dengan demikian, transparansi e-Dalev bersifat adaptif, bukan sekadar prosedural, dan tetap mempertimbangkan dinamika persepsi publik.

2. Reformasi Internal Bappeda

Reformasi internal Bappeda menjadi pilar penting (Faqih Ragi et al., 2024). Reformasi ini mencakup Pelatihan teknis dan konseptual bagi aparatur Bappeda dalam mengelola sistem digital, termasuk pemahaman prinsip keterbukaan dan etika komunikasi publik dan restrukturisasi kelembagaan, guna memperjelas alur tanggung jawab dalam koordinasi dengan DPRD, sehingga mengurangi tumpang tindih peran atau penyalahgunaan otoritas dalam proses perencanaan anggaran. Sejumlah kajian literatur mengenai transparansi informasi publik menunjukkan bahwa publikasi data semata sering kali dianggap telah memenuhi standar keterbukaan, meskipun dalam praktiknya hal tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat (Andriana, 2024). Beberapa penelitian menegaskan bahwa pemerintah daerah kerap menganggap penyediaan data secara daring sudah memadai sebagai wujud transparansi (Lusiana, 2022). Namun tanpa adanya

sosialisasi, edukasi publik, atau pendampingan penggunaan sistem yang sudah ada mengenai transparansi anggaran seperti contohnya SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), keterbukaan tersebut tidak serta-merta menghasilkan pemahaman yang bermakna bagi masyarakat.

Adanya kesenjangan antara formalitas keterbukaan yang hanya berfokus pada penyediaan data dan dengan kebutuhan publik untuk memahami dan memanfaatkan data tersebut secara substantif (Taufik et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi tidak cukup dijalankan pada level teknis, tetapi juga membutuhkan strategi komunikasi publik yang aktif dan inklusif. Reformasi internal dalam birokrasi anggaran disini perlu mencakup penguatan mekanisme komunikasi, edukasi digital, serta pelibatan masyarakat agar informasi yang dipublikasikan benar-benar dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan. Upaya membangun forum kemitraan yang partisipatif antara Bappeda dan DPRD merupakan respons terhadap potensi disfungsi birokrasi yang berakar pada kecurigaan publik terhadap proses politik anggaran. Situs ini diharapkan memperkuat transparansi deliberatif, di mana pertukaran informasi tidak hanya satu arah, tetapi juga melibatkan aspirasi dari masyarakat sipil dan kolektif-kolegialitas dalam pengambilan keputusan, yang selama ini cenderung disalahpahami sebagai indikasi tarik-menarik kepentingan politis.

3. Persepsi Publik dan Tantangan Politisasi

Literatur terdahulu mengenai transparansi pemerintahan daerah menunjukkan bahwa ketimpangan persepsi publik terhadap keterlambatan informasi sering kali menimbulkan anggapan bahwa pemerintah bersikap tertutup atau mempolitisasi proses penyampaian informasi, meskipun sebagian besar tahapan administrasi sebenarnya telah mengikuti prosedur legal-formal yang berlaku (Sutrisno, 2020; Ramadhani, 2022). Kesalahpahaman ini umumnya dipicu oleh kurangnya penjelasan pemerintah mengenai alur kerja internal serta terbatasnya saluran komunikasi yang mampu menjembatani kebutuhan informasi masyarakat (Hidayat & Pertiwi, 2023). Kajian terbaru menegaskan bahwa transparansi yang ideal tidak harus berarti membuka seluruh data secara bebas tanpa penyaringan, tetapi menekankan keterbukaan yang proporsional, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan publik (Pratama & Halim, 2020; Wahyuningrum, 2023). Apabila informasi hanya dipublikasikan tanpa edukasi atau mekanisme komunikasi dua arah, maka keterbukaan tersebut menjadi bersifat formalitas dan tidak mampu meningkatkan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, rekomendasi model transparansi yang menekankan aksesibilitas, kejelasan informasi, serta strategi komunikasi publik yang aktif penting agar masyarakat dapat memahami proses pemerintahan secara lebih utuh dan tidak terjebak pada opini negatif yang tidak berdasar (Rahman & Djalante, 2022).

4. Patologi Birokrasi: Overlapping Kewenangan

Permasalahan klasik dalam tata kelola daerah seperti overlapping kewenangan antara Gubernur dan DPRD turut menjadi faktor disfungsi. Ketika masyarakat tidak dapat mengidentifikasi siapa yang memegang otoritas utama dalam proses anggaran, muncul kebingungan yang berujung pada delegitimasi terhadap seluruh proses. Penelitian ini menekankan bahwa transparansi tidak cukup hanya dengan membuka data, tetapi juga membangun kejelasan peran dan akuntabilitas kelembagaan.

5. Evaluasi Dampak e-Dalev terhadap Transparansi dan Partisipasi

Tujuan utama dari integrasi sistem e-Dalev adalah menjawab kebutuhan akan tata kelola anggaran sebagai berikut:

- a) Transparan melalui publikasi proporsional secara berkala guna memonitoring hasil kebijakan secara terbuka.

- b) Akuntabel rekam jejak digital termonitor yang dapat diaudit publik dan lembaga pengawas.
- c) Partisipatif tersedianya forum deliberatif yang terhubung dengan DPRD melalui pemanfaatan situs yang terintegrasi.

Dalam dimensi fungsional, e-Dalev bukan hanya platform teknis, tetapi juga penghubung transformasi kelembagaan, yang mengubah budaya birokrasi dari sekadar administratif menjadi responsif dan partisipatif.

Sistematika Proses Penyelesaian

Dalam proses penyusunan anggaran daerah, peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai lembaga teknokratik sangat strategis dalam merancang program pembangunan yang terukur dan berkelanjutan (Nasution, 2020). Namun, dalam praktiknya, hubungan dan koordinasi antara Bappeda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kerap menghadapi berbagai kendala, terutama terkait integrasi data dan sinkronisasi aspirasi politik dengan rencana teknokratik. Sistem digital yang ada saat ini di Kota Serang, seperti e-Planning dan e-Budgeting, telah membantu mendukung proses perencanaan dan penganggaran. Akan tetapi, belum ada platform yang mampu merekam secara transparan seluruh jejak keputusan dan diskusi yang terjadi antara Bappeda dan DPRD. Dalam konteks ini, e-DALEV (Elektronik Pengendalian dan Evaluasi) muncul sebagai inovasi penting yang berpotensi merevolusi tata kelola anggaran daerah.

e-DALEV dirancang untuk menjadi platform digital kolaboratif yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi anggaran secara menyeluruh. Sistem ini memungkinkan dokumentasi real-time dari berbagai tahap pembahasan anggaran, sehingga seluruh proses dapat diawasi secara terbuka oleh publik dan stakeholder terkait. Dengan demikian, e-DALEV tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memudahkan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan anggaran secara efektif. Lebih jauh, e-DALEV dapat memperbaiki sinkronisasi antara perencanaan teknokratik Bappeda dengan aspirasi politik DPRD. Melalui fitur yang memfasilitasi komunikasi data yang terintegrasi, sistem ini membantu mengurangi tumpang tindih peran serta meningkatkan kolaborasi berbasis data. Hal ini tentu menjadi langkah strategis dalam mengatasi problem disfungsi birokrasi yang selama ini menjadi tantangan dalam penyusunan APBD di Kota Serang. Dengan demikian, reformasi peran Bappeda melalui pemanfaatan e-DALEV bukan hanya sebagai alat digitalisasi, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk mewujudkan penganggaran daerah yang partisipatif, akuntabel, dan transparan. Implementasi e-DALEV berpotensi memberikan nilai tambah signifikan dalam tata kelola anggaran yang mendukung pembangunan daerah secara optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Permasalahan utama dalam penyusunan APBD di Kota Serang masih ditandai oleh lemahnya transparansi, keterbatasan integrasi data antara Bappeda dan DPRD, serta belum tersedianya sistem yang mampu merekam secara utuh proses deliberasi dan pengambilan keputusan anggaran. Keberadaan sistem digital seperti e-Planning dan e-Budgeting belum sepenuhnya mampu menjamin keterlacakan proses kebijakan secara menyeluruh, sehingga masih membuka ruang politisasi anggaran, tumpang tindih kewenangan, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap proses penganggaran daerah.

e-DALEV diposisikan sebagai inovasi strategis yang berpotensi menjawab persoalan tersebut melalui integrasi fungsi perencanaan, legislasi, dan evaluasi dalam satu ekosistem digital yang kolaboratif. Sistem ini mampu memperkuat transparansi substantif melalui

penyediaan rekam jejak digital yang dapat diaudit, meningkatkan akuntabilitas kelembagaan, serta mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna. Selain itu, e-DALEV juga berpotensi memperkuat profesionalisme teknokratis Bappeda, meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan DPRD, serta menekan praktik non-merit dalam proses penganggaran.

Secara konseptual, e-DALEV tidak hanya berfungsi sebagai instrumen digitalisasi administratif, tetapi juga sebagai katalis transformasi tata kelola pemerintahan daerah menuju sistem yang lebih terbuka, objektif, dan berbasis data. Keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh komitmen politik pemerintah daerah, kesiapan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi, serta strategi komunikasi publik yang aktif dan inklusif. Dengan terpenuhinya prasyarat tersebut, e-DALEV berpotensi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola penganggaran daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di Kota Serang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrofiq, M. (2025). Efektivitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. 3, 124–133.
- Andriana, D. (2024). Akuntabilitas Publik. Deepublish Digital.
- Aziz, Y. M. A., Ariesmansyah, A., Indrianie, M., & Arifin, R. K. (2024). *Dinamika Digital Governance : Antara Teori dan Praktek di Era 4.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Edtiyarsih, D. D. (2023). Urgensi Anggaran Kas Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Yang Efisien Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12(4), 368.
- Emilia Gustini, & Marcelina Angraini. (2025). Analisis Mekanisme Penyusunan Anggaran Belanja Barang dan Belanja Pegawai di Instansi Kepolisian Polrestabes Palembang. *Akubis : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 73–86.
- Fadhilah, M. Y. (2021). Strategi Pemerintah Daerah dalam Penguatan Koordinasi Kelembagaan pada Pelaksanaan Sistem Perencanaan Penganggaran Terintegrasi di Kabupaten Lahat. *Insitut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Faqih Ragi, Andhika Rendra Nugraha, Adinda Putri Maharani, Nurlistiadewi K.Affandi, & Ivan Darmawan. (2024). Sinergi Pembinaan Dan Pengawasan: Kunci Keberhasilan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta Dalam Konteks Reformasi Birokrasi Evaluasi Kinerja Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 274–283.
- Firnanda, R., P, D. A., Permatasari, T., & Luthfi, A. (2025). Implementasi Sistem Anggaran Berbasis Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan. *JURNAL ILMIAH Ekonomi Modern Dan Tradisional*, 2(1), 59–67.
- Handrian, E., & Novita, M. (2025). Adopsi Inovasi Kebijakan Digital yang Inklusif: Studi Kasus Aplikasi Sipintar Peduli di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 105–119.
- Hasani, B. (2025). Model Kepemimpinan Kolektif Kolegial pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasa Syar'iyah. *UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*.
- Hasibuan, S. I. (2022). Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Paluta Dalam Penetapan PERDA APBD Kabupaten Paluta. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(1), 181–190.
- Hidayati, M. N. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Merit dalam Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo. *Insitut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Ikhyanuddin, Haykal, M., & Murhaban. (2025). Reformasi pengelolaan keuangan daerah: Inovasi dan Tata Kelola Penyusunan APBD. *Takaza Innovatix Labs*.
- Irianto, J., Asmorowati, S., Maulana, F., Amrulloh, M. C., Mardianti, E., & Lapasa, A. P. (2025).

- Manajemen Sumber Daya Manusia di Sektor Publik - Strategi, Tantangan, dan Inovasi di Era Digital. Airlangga University Press.
- Kamala, J., Selvi Aulya Salsa, Nurilawati, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(7), 120–128.
- Kannapadang, D., Munawaroh, S., & Purwanto, S. A. (2025). Optimizing E-Government for Enhanced Transparency and Accountability in Local Governance. *JIMKES: Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(5), 4203–4212.
- Khotimah, K., Dayar, M. B., Chilmy, N. W., Hikmah, F. N., Sunarto, I., & Mayasari, N. (2025). *Administrasi Publik: Birokrasi Menuju Transformasi Digital*. Widina Media Utama.
- Komara, S. R. (2025). Reformasi Pengelolaan Aset Daerah Melalui Upaya Digitalisasi di Wilayah DKI Jakarta. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 17(1), 172–178.
- Lusiana, M. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Anggaran Dana Nagari pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Nagari Sarilamak. UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- Muhammad Irfan Ma'ruf, Fania Cindy Levina, G. R. D. (2024). Transparansi Penggunaan APBD Dalam Penggunaan Infrastruktur Daerah. *Humani*, 01(1).
- Mutmainah, Ningtyas, D. W., Mudawamah, M., & Maulia, F. N. (2025). Implementasi Demokrasi Deliberatif dalam Formulasi Kebijakan Bantuan Dana Kesehatan Desa Trayu. *Jurnal Administrasi Publik*, 16, 137–151.
- Nasution, N. (2020). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Perencanaan Anggaran Berdasarkan Renstra. 2, 630–640.
- Pratama, M. A. A. P., Rafdi, H., & Patty, A. N. (2024). Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 2023). *Jiposster: Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan*, 3(4), 40–49.
- Pristiyanto. (2024). *Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik (Good Governance)* (Syahril (Ed.)).
- Rachmad, Y. E., Ilham, R., Indrayani, N., Manurung, H. E., Judijanto, L., Laksono, R. D., & Sa'dianoor, S. (2024). *Layanan dan Tata Kelola E-Government (Teori, Konsep, dan Penerapan)*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Rahman, R., Muhammad Arsyad, Asriani, Muhammad Ishak Syahadat, & Muhammad Amir. (2024). Kolaborasi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Inklusif Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 7(2), 677–694.
- Rasyid, M. F. H. (2022). Pembentukan Politik Birokratik dalam Pemerintahan Daerah (Studi Relasi DPRD-Birokrasi di Kota Yogyakarta). In APMD. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
- Sariono, E., & Sitorus, M. (2024). Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Depok. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 3580–3587.
- Setiawan, I., Derenov, N., & Arti, B. (2022). Hubungan Inovasi Pemerintahan Terhadap Restrukturisasi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(2), 234–248.
- Simanjuntak, I. N. C. Y., & Silalahi, W. (2025). Efektivitas Legislative, Executive, dan Judicial Review dalam Menjaga Supremasi Konstitusi dan Hak Warga di Era Digital. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 1957.
- Sipayung, P. D. (2025). *Hukum Anggaran: Pilar Keuangan Negara Yang Berkeadilan* (F. A. Saputri & A. Noviya).
- Sitepu, R. K. K., & Mahesa, R. (2022). *Kajian Pembangunan Daerah Pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023*. Widina, 124.
- Suganda, D. A., Nur, M., Usulu, E. M., & Abubakar, F. (2025). *Administrasi Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi dalam Pemerintahan Modern*. In PT Media Penerbit Indonesia. PT Media Penerbit Indonesia.
- Taufik, T., Sarinah, S., Amir, M., Liwaul, L., Azizah, N., Suaib, E., Nurhayati, S., Kartika, B.,

- Rintaka, M. I. N. I., Rahman, R., Elwan, L. O. M., Kadir, A., Sudirman, F. A., Rasmin, R., & Rijal, M. (2025). *Digital Governance: Konsep, Strategi dan Implementasinya di Indonesia*. CV. Gita Lentera.
- Yamin, M. (2022). *Monografi Relasi Kuasa Eksekutif-Legislatif dalam Pembahasan APBD* (M. Nasrudin (Ed.). PT. Nasya Expanding Management.
- Yuniar, M. R., & Firmansyah, A. (2023). The Transparency Level of Local Governments in Indonesia: Does the Level of Financial Health Matter? *JURNAL TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA*, 9(1), 123–150.